

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN DI DESA TELUK BAKAU KECAMATAN GUNUNG KIJANG KABUPATEN BINTAN

1). Diah Siti Utari

2). Suhardi Mukhlis

3). Dwiniati

4). Ayu Dwi Astuti

1),3). Administrasi Publik STISIPOL Raja Haji

2),4). Ilmu Pemerintahan STISIPOL Raja Haji

Email: diahsitiutari08@gmail.com; bundafitri28@gmail.com; Ayudwi8323@gmail.com

Abstract

Human Resource Development Program and empowerment of marine and fishery communities in Teluk Bakau Village, Gunung Kijang District, Bintan Regency Is a program contained in the Strategic Plan of the Department of Marine Affairs and Fisheries of the Riau Islands Province. However, in the implementation of the program, there are still some obstacles in its implementation. The resource development program has not been able to increase the productivity of fishermen. In the field of empowerment, it can be seen that there are no optimal activities carried out by the relevant agencies in empowering the marine and fishery community in Teluk Bakau Village.

The purpose of this research is basically to find out how to implement the Human Resource Development Program and empower marine and fishery communities in Teluk Bakau Village, Gunung Kijang District, Bintan Regency. In this study, the respondents consisted of five DKP staff from the Riau Islands Province and one fisherman group and one village staff. The data analysis technique used in this research is descriptive qualitative method with purposive sampling technique.

The results of this study conclude that the Human Resource Development program and the empowerment of marine and fishery communities in Teluk Bakau Village, Gunung Kijang District, Bintan Regency have been implemented but are still not optimal, there are several things that must be improved in the program. The advice given so that this program can run optimally is to further improve the guidance and coordination of the implementation of marine and fisheries development to the local community. Field fisheries assistants are still very minimal in Teluk Bakau Village, not comparable to the existing active fishing groups.

Keywords: *implementation, program, Marine and Fisheries Service*

Abstrak

Program Pengembangan Sumberdaya Manusia dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan di Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Adalah sebuah Program yang terdapat di Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Namun dalam Implementasi Program tersebut masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Program Pengembangan sumberdaya belum dapat meningkatkan angka produktifitas nelayan. Dalam bidang

pemberdayaan dapat dilihat bahwa belum adanya kegiatan yang optimal yang dilakukan oleh dinas terkait dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat kelautan dan perikanan yang ada didesa teluk bakau.

Tujuan penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui pengimplementasian Program Pengembangan Sumberdaya Manusia dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan di Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan.

Dalam penelitian ini Responden terdiri dari lima orang Staf DKP Provinsi Kepri dan satu orang kelompok nelayan serta satu staff desa. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik purposive sampling.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa program Pengembangan Sumberdaya Manusia dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan di Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan sudah terlaksana tetapi masih belum maksimal terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki dalam programnya. Adapun saran yang diberikan agar program ini dapat berjalan maksimal adalah Meningkatkan lagi pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan kepada masrakat setempat. Pendamping perikanan lapangan masih sangat minim di Desa Teluk Bakau tidak sebanding dengan kelompok nelayan aktif yang ada.

Kata kunci :Implementasi,program,Dinas Kelautan dan Perikanan

PENDAHULUAN

Pemberdayaan adalah sebuah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri mereka sendiri. Menurut Noor (2011), pemberdayaan masyarakat merupakan suatu konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat people-centered, dan participatory. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Kabupaten Bintan merupakan daerah maritim yang bisa dikatakan besar Karena sebagian besar wilayah Bintan merupakan perairan yang luas. Kondisi itu menjadikan Bintan sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi besar di bidang kelautan. Kabupaten Bintan di resmikan berdasarkan PP (Peraturan Pemerintah) No. 5 Tahun 2006 tanggal 23 Februari 2006. Serta Kabupaten Bintan adalah daerah yang memiliki sumber daya pesisir laut yang sangat potensial. Pemerintah Kabupaten Bintan telah menetapkan kawasan pesisir timur Pulau Bintan adalah Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Kabupaten Bintan dengan SK Bupati Bintan No. 261/VIII/2007 dengan luas kawasan 116.000 ha. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau memiliki program yang merupakan bagian dalam rencana

strategis Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021, dinas ini memiliki program yaitu program pengembangan sumberdaya manusia dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan. Sebagaimana penelitian ini bahwa program yang terdapat di renstra DKP (Dinas Kelautan Perikanan) Provinsi Kepulauan Riau merupakan bentuk pengalihan aturan dari Dinas Perikanan Kabupaten Bintan dan sudah berjalan sebagaimana mestinya , namun dalam implementasi program tersebut masih terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaannya. Adapun tujuan program tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan serta pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan, dengan sasaran meningkatnya jumlah pelaku usaha perikanan terampil, dan tenaga penyuluh perikanan , pada bidang perikanan dan kelautan dengan memanfaatkan sumberdaya perikanan dan kelautan secara optimal, adil dan berkelanjutan. Indikasi kegiatan dari program tersebut yaitu ,pengembangan dan penguatan lembaga pengawas sumber daya kelautan dan perikanan, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pengawasan dan Pokmas (Kelompok Pengawas)dan pendamping perikanan lapangan. Dengan tujuan terjaganya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan (sustainability), dan memiliki sasaran terselenggaranya tata kelola pemanfaatan sumberdaya kelautan dan dan terselenggaranya pengendalian, pengawasan dan penegak hukum, dengan indikator sasaran yaitu meningkatnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan , dan pengendalian, pengawasan dan penegak hukum serta sarana dan prasarana kelautan dan perikanan. Dari program dan tujuan tersebut maka salah satu indikator kinerja yang terdapat dealam rencana strategis DKP Provinsi Kepulauan Riau adalah jumlah pokmaswas (kelompok masyarakat pengawas) yang bereperan aktif dalam kegiatan pengawasan. Implementasi Program tersebut masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Program Pengembangan sumberdaya belum dapat meningkatkan angka produktifitas nelayan. Dalam bidang pemberdayaan dapat dilihat bahwa belum adanya kegiatan yang optimal yang dilakukan oleh dinas terkait dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat kelautan dan perikanan yang ada didesa teluk bakau.

Tujuan penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui pengimplementasian Program Pengembangan Sumberdaya Manusia dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan di Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten

Bintan. Berdasarkan uraian fenomena diatas maka diperlukan analisis pengkajian lebih lanjut mengenai penelitian dengan judul “Implementasi Program Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan di Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan ”

KAJIAN PUSTAKA

Implementasi Program

Menurut Sardjo, Darmajanti, & Boediono(2016), Indikator implementasi program diukur melalui pelaksanaan program terkait lingkungan, ditingkat institusi dan ditingkat komunitas termasuk kelompok sasaran preogram. Impelementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana untuk membuat suatu dan memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama.

Makna implementasi adalah upaya untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus implementasi kebijakan (Susila, 2015). Tujuan utama implementasi ialah untuk melaksanakan rencana yang telah atau sudah disusun dengan cermat, baik itu oleh individu atau juga kelompok.

1. Untuk dapat menguji serta juga mendokumentasikan suatu prosedur didalam penerapan rencana atau juga kebijakan.
2. Untuk dapat mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak akan dicapai di dalam perencanaan atau juga kebijakan yang telah atau sudah dirancang.
3. Untuk dapat mengetahui kemampuan masyarakat didalam menerapkan suatu kebijakan atau juga rencana sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Donald S. Van Meter dan Carl E. VanHorn karena model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik, pelaksana bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel. Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan A Model of the Policy Implementation (1975). Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Sikap para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Pengembangan SDM

Menurut Hasibuan, jenis pengembangan dibagi menjadi 2, yaitu pengembangan secara informal dan formal.

- 1) Pengembangan secara informal, yaitu karyawan atas keinginan dan usahanya sendiri melatih dan mengembangkan dirinya dengan mempelajari buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan pekerjaan atau jabatannya.
- 2) Pengembangan secara formal, yaitu karyawan atau pegawai ditugaskan organisasi untuk mengikuti pendidikan atau latihan, baik yang dilakukan oleh organisasi maupun yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pendidikan atau pelatihan.

Ditinjau dari masa pelaksanaannya, pelatihan sebagai bagian dari tugas pengembangan, Sedarmayanti mengemukakan ruang lingkup pengembangan SDM adalah sebagai berikut:

- 1) Pre service training (pelatihan pratugas) adalah pelatihan yang diberikan kepada calon karyawan yang akan mulai bekerja, atau karyawan yang baru bersifat pembekalan, agar mereka dapat melaksanakan tugas yang akan dibebankan kepada mereka.
- 2) In service training (pelatihan dalam tugas), adalah pelatihan dalam tugas yang dilakukan untuk karyawan yang sedang bertugas dalam organisasi dengan tujuan meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan.
- 3) Post service training (pelatihan purna/pasca tugas) adalah pelatihan yang dilaksanakan organisasi untuk membantu dan mempersiapkan karyawan dalam menghadapi pensiun, misalnya pelatihan wirausaha

Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sugarto, Edi (2005), secara konseptual pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang. Khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh, untuk dan dalam masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam semua aspek kehidupannya.

Menurut Rosmaladewi (2018), pemberdayaan adalah suatu proses untuk berdaya, memiliki kekuatan, kemampuan dan tenaga untuk menguasai sesuatu. Pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat adalah suatu proses untuk memiliki atau menguasai kehidupan atau status sosial ekonomi yang lebih baik, dengan cara diberikan proses peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan-pelatihan secara formal maupun non formal dengan materi pelatihan *hard skill* maupun *soft skill*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2007), bahwa "data kualitatif adalah data dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambaran". Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Gunung Kijang tepatnya di Desa Teluk Bakau Kabupaten Bintan. Lokasi penelitian di Desa Teluk Bakau. Populasi yang diambil dalam penelitian ini yaitu masyarakat Desa Teluk Bakau yang menjadi kelompok sasaran dari kebijakan pemerintah yaitu masyarakat kelautan dan perikanan yang berjumlah kurang lebih 144 jiwa, pegawai dinas kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau yang berjumlah 50 orang, dan pemerintah desa Teluk Bakau yang berjumlah 20 orang. Teknik sampel yang digunakan yaitu *Purposive Sampling*. Data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dimana alat pengumpulan

datanya adalah pedoman wawancara, catatan harian hasil observasi, dan dokument. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisa data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi program pengembangan sumberdaya manusia dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan di desa teluk bakau kecamatan gunung kijang kabupaten bintang.

- i. Untuk mengetahui keberhasilan pengimplementasian program pengembangan sumberdaya manusia dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan di desa teluk bakau kecamatan gunung kijang kabupaten bintang dapat dilihat dari dimensi berikut ini :**

A. Standar dan Sasaran Kebijakan

- 1. Standar dan sasaran kebijakan yang akan dilakukan oleh pihak terkait harus sesuai standar dan tujuan yang ingin dicapai.**

Berdasarkan Data yang diperoleh dari lapangan saat mengobservasi dan mewawancara responden, yaitu dapat dipahami bahwa tujuan dari renstra yang disusun oleh Dinas Kelautan Perikanan provinsi kepri saat ini adalah pengimplementasian pengembangan sumberdaya manusia dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Jika dilihat dari renstra Dinas Kelautan Perikanan provinsi saat ini bahwa tujuan dari pengimplementasian tersebut adalah penmanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan dengan indikator kinerja mereka yaitu peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pengawasan.

- 2. Pelaksana atau dinas terkait melakukan upaya sebagaimana semestinya agar terciptanya keberhasilan dalam melaksanakan implementasi.**

Dari hasil wawancara dilapangan dengan melihat jawaban para responden maka dapat disimpulkan bahwa , standar dan sasaran kebijakan dari program pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan didesa

teluk bakau bisa berhasil karena adanya kerja sama antara dinas kelautan dan perikanan provinsi kepri dengan masyarakat desa teluk bakau yang bisa menerima kehadiran para pendamping lapangan yang sudah siapakan untuk bertugas membantu para nelayan mengembangkan karir atau usahanya. Jika kerja sama tercipta maka akan berdampak pada keberhasilan program ini. Dapat dilihat dari observasi yang ada dilapanagn bahwa Dalam mencapai tujuan tersebut tentunya tidak terlepas dari aturan main dan rencana induk itu sendiri, rencana strategis yang merupakan usulan dari dinas dan menjadi olahan provinsi terkait pengembangan sumberdaya manusia dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan adalah terjaganya kelestarian sumberdaya kelautan secara berkelanjutan. Penambahan pendamping juga sangat berpengaruh untuk memaksimalkan program ini berjalan maksimal.

B. Sumber Daya

1. Pihak pelaksana mempersiapkan sumber daya yang berkualitas dan sesuai dengan pekerjaan yang akan dijalankan agar tercapai sesuai.

Dari hasil analisa observasi peneliti terhadap permintaan responden program yang dibuat oleh DKP provinsi tampak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat nelayan salah satunya keberhasilan yang dirasakan oleh mereka adalah meningkatnya pelaku usaha perikanan terampil, tetapi nelayan juga mengeluh karena bantuan yang diberikan hanya sebatas saja tidak ada kelanjutan program apa selanjutnya yang akan nelayan lakukan. Seharusnya dinas kelautan Perikanan Membuat agenda baru contohnya seperti memberikan bantuan seperti isasaran alat tangkap yang modern, jadi nelayan bekerja tidak dengan cara yang tradisional lagi.

2. Dukungan dari pihak lain terutama dukungan sumber daya manusia maupun non manusia sangat mempengaruhi dalam terlaksananya suatu program.

Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan saat observasi para responden diatas sebagian masyarakat nelayan merasa terbantu atas pendampingan dan pemberdayaan ini tetapi tidak semua nelayan mendapatkan arahan dan bimbingan dikarenakan kurangnya anggota pendamping lapangan yang disiapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, sehingga menghambat program tersebut berjalan dengan maksimal seharusnya DKP provinsi mendambah lagi anggota PPL (pendamping perikanan lapangan) agar semua masyarakat nelayan merasakan perubahan.

Hambatan lain yang peneliti lihat dalam melaksanakan program ini adalah pendanaan yang kurang transparan jadi tidak terlalu tampak dananya untuk program pengembangan dan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan didesa teluk bakau.

C. Hubungan antar organisasi

1. Hubungan antar organisasi sangat diperlukan dalam suatu kebijakan.

Dari hasil wawancara para responden peneliti melihat bahwa adanya keterkaitan yang terjadi diantara organisasi tersebut dalam menjalankan program, masing-masing dari mereka sudah menyiapkan instansi lain dalam membantu menyelesaikan program ini contohnya kementerian kelautan dan perikanan sudah menyiapkan otoritas dalam bidang pengawasan yaitu Direktorat Jenderal pengawas sumberdaya kelautan dan perikanan (PSDKP). Dari hasil analisis observasi peneliti, program pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan didesa teluk bakau kecamatan gunung kijang sudah berjalan secara optimal karna sudah ada kelompok pengawas yang dipilih untuk menjaga sumberdaya perikanan didesa tersebut.

2. Hubungan struktur organisasi terkait dalam pelaksanaan program implementasi sangat mempengaruhi dalam menjalankan sebuah program.

Dalam hal ini Struktur organisasi dalam menjalankan sebuah program harus tersusun karena menjalankan sebuah program harus ada koordinasi dengan pihak lain. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lihat dilapangan bahwa Dari pemaparan responden bahwa adanya hubungan antar organisasi memiliki tugas dan fungsinya masing-masing disetiap bidang. pada bidang kelautan konservasi dan pengawasan yang terdiri dari 3 seksi pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil, Seksi konservasi dan keanekaragaman sumber daya, Seksi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. mereka akan sangat memaksimalkan kinerjanya agar dapat dijadikan acuan untuk lebih meningkatkan program selanjutnya.

D. Sikap/disposisi implementor

1. Sikap implementor sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan public.

Dari hasil observasi diatas bahwa kebijakan program pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan didesa Teluk Bkau telah dilaksanakan oleh DKP Provinsi sejak peralihan 10 kewenangan dari pemerintah kabupaten menjadi kewenangan provinsi. Saat ini kebijakan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat kelautan perikanan mengacu pada tiga peraturan perundang-undangan yaitu UU no.1 tahun 2007, pepres No. 73 tahun 2015 dan permen KP no. 23 tahun 2016 tentang rencana zonasi. Peraturan menteri KP no. 23 tahun 2016 menjelaskan tentang pembagian rencana zonasi kawasan yang memiliki fungsi masing-masing dan sebagai penguatannya provinsin kepri menyusun RPJMD tahun 2016-2021 yang diadopsi dari visi-misi gubernur yang ke5.

ii. Faktor -faktor yang mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan di Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan.

Dalam menjalankan sebuah program tentu saja ada faktor-faktor yang membuat suatu program tersebut dapat dilihat berhasil atau tidaknya, karna pada intinya preogram ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan serta dapat melakukan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan terhadap masyarakat teluk bakau dengan sasaran dapat meningkatnya jumlah pelaku usaha perikanan terampil , dan tenaga penyuluh perikanan pada sentra perikanan. Dari hasil pengamatan peneliti saat melakukan observasi peneliti tidak melihat faktor penghambat dari para nelayan karena mereka sangat menerima sekali program pengembangan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarkat kelautan dan perikanan yang ada didesa mereka karena membantu mereka dalam meningkatkan usaha perikanan mereka menjadi lebih terampil , tetapi jika dilihat dari segi pendampingan memang sangat kurang pendamping perikanan yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri tidak sebanding dengan kelompok nelayan yang ada sehingga sebagian nelayan masih sangat tertinggal dan kurangnya pengetahuan terhadap kelautan dan perikanan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan program pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan di Kabupaten bintang merupakan upaya pemerintah daerah dalam melestarikan kekayaan sumber daya yang berkelanjutan serta mengembangkan masyarakat nelayan agar bisa berkreatifitas. Sumber daya kelautan merupakan sumber daya yang dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka yang panjang. Penelitian ini berusaha untuk menjawab bagaimanakah implementasi kebijakan program pengembangan sumberdaya manusia dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan di desa teluk bakau kabupaten bintang . Metodologi dalam penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn mengenai implementasi kebijakan publik dengan pendekatan kualitatif yang menjelaskan tentang bagaimana penerapan kebijakan pada pengimplementasian program pengembangan sumber daya dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan didesa teluk bakau pasca peralihan kewenangan dikarenakan perubahan UU tentang pemerintah daerah. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara dan observasi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya peraturan yang lebih rinci terkait teknis dalam pemindahan kewenangan tentang Pemerintah Daerah menentukan bahwa Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan di wilayah laut, saat ini kewenangan tersebut telah di alihkan kepada pihak Provinsi.
2. Meningkatkan lagi pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan kepada masrakat setempat.
3. Pendamping perikanan lapangan masih sangat minim di Desa Teluk Bakau tidak sebanding dengan kelompok nelayan aktif yang ada

DAFTAR PUSTAKA

- Edi Sugarto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*, (Bandung: PT Ravika Adimatama 2005)
- Hasibuan, Malayu Sp. 2012. *Manajemen SDM. Edisi Revisi, Cetakan KeTigabelas*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Rosmaladewi, O. (2018). *Manajemen Kemitraan Multistakeholder dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- PP (Peraturan Pemerintah) No. 5 Tahun 2006 tanggal 23 Februari 2006
- Sardjo, S., Darmajanti, L., & Boediono, K. (2016). *Implementasi model evaluasi formatif program pembangunan sosial*. Jakarta: yayasan pustaka obor.
- Sedarmayanti. 2017. *Perencanaan dan Pengembangan SDM untuk Meningkatkan Kompetensi, Kinerja dan Produktivitas Kerja*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sugiyono. (2007). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABET.
- Susila, I. (2015). *Implementasi Dimensi Pelayanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.